

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pangan Industri Rumah Tangga yang ada di kota Gorontalo belum begitu optimal karena masih banyak perusahaan kecil yang belum mendapatkan sertifikat PIRT dari dinas kesehatan, dari pihak dinas kesehatan sudah melakukan penyuluhan atau pengawasan kepada perusahaan kecil agar bisa mendapatkan sertifikat PIRT tetapi perusahaan itu sendiri masih banyak yang melanggar. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan Pom menetapkan pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.

2. Faktor-faktor yang menghambat perusahaan kecil belum mendaftarkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di dinas kesehatan kota Gorontalo, adalah tempat produksi, karena tempat produksi harus bersih dan jauh dari pembuangan sampah, jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka dari pihak

dinas kesehatan tidak akan mengeluarkan sertifikat PIRT. Faktor yang kedua adalah penggunaan merek pada produk, yaitu jika ada beberapa perusahaan yang menggunakan merek yang sama maka harus ada salah satu yang harus diganti mereknya.

5.2 SARAN

dari hasil pembahasan serta beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Dalam undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ada maka sertifikat PIRT tersebut akan di cabut. Selain itu diharapkan juga kepada perusahaan kecil yang ada di kota Gorontalo yang belum memiliki sertifikat PIRT untuk segera mengurus persyaratan dari dinas kesehatan agar bisa cepat mendapatkan sertifikat PIRT dari dinas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, 2012, Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (*Home Industri*) Tanpa Izin Dinas Kesehatan, Universitas Hasanuddin Makasar.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2011, Pedoman Pembinaan IRTP Bagi Petugas, Gorontalo.
- Fence M. Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kefarmasian Hukum (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, Sengketa Konsumen, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.

Suhardjo, Laure Jane Harper, Bradi J, 2009, Pangan Gizi dan Pertanian, Universitas Indonesia, Jakarta.

Lain-lain :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Peraturan Kepala BPOM RI NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.